

PENDAMPINGAN DAN ANALISIS DAMPAK SOSIO-EKONOMI PEMBATALAN HILIRISASI KELAPA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Agus maulana¹, Muhammad Fauzan², Forbis Ahamed³, Muhammad Jalil⁴, Sujeni⁵, Muhammad Ghalih⁶

^{1,2}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

⁴Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

⁵Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, Indonesia

³Faculty of Business Management & Profesional Studies, Management & Science University, Malaysia

⁶Taiwan College of Business, Taiwan University of Science & Technology, Taiwan

*e-mail: agusmaulanaunisi@gmail.com

Abstract

Indragiri Hilir Regency possesses the world's most extensive coconut plantation area; however, the cancellation of the planned downstream industrialization by the central government has imposed systemic impacts on the welfare of local farmers. This study aims to analyze the socio-economic consequences of this cancellation and the sustainability risks facing the coconut sector in Indragiri Hilir. The methodology employed is descriptive-qualitative, utilizing secondary data analysis and economic impact simulations. The results indicate that the cancellation of downstreaming prolongs the dominance of a monopsonistic market structure (Sambu Group), where farmers remain price takers with low prices ranging from IDR 1,200 to 2,200 per nut. Conversely, the added value of exported processed products reaches 300–600% (equivalent to IDR 7,000–9,000 per nut), which is exclusively captured by large corporations. Furthermore, a "resource drain" phenomenon occurs due to the massive export of raw coconuts to Vietnam and Thailand, resulting in the loss of foreign exchange potential and local employment opportunities. Simulations suggest that downstreaming could potentially increase farmer income by 15–60% and elevate the coconut sector's GRDP by 35–40%. Without policy interventions such as village-based downstreaming and minimum price regulations, the risk of land-use conversion from coconut to oil palm will escalate, potentially damaging the coastal ecosystem and erasing the region's identity as the world's coconut hub.

Abstrak

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dengan hamparan kelapa terluas di dunia, namun pembatalan rencana hilirisasi oleh pemerintah pusat memberikan dampak sistemik terhadap kesejahteraan petani lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosio-ekonomi pembatalan hilirisasi serta risiko keberlanjutan sektor perkebunan di Indragiri Hilir. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder dan simulasi dampak ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan hilirisasi memperpanjang dominasi struktur pasar monopsoni (Sambu Group), di mana petani tetap menjadi *price taker* dengan harga rendah berkisar Rp 1.200–2.200 per butir. Sebaliknya, nilai tambah produk olahan ekspor mencapai 300–600% (setara Rp 7.000–9.000 per butir) yang hanya dinikmati oleh korporasi. Fenomena *resource drain* juga terjadi akibat ekspor kelapa mentah ke Vietnam dan Thailand, yang menyebabkan hilangnya potensi devisa dan penyerapan tenaga kerja lokal. Simulasi menunjukkan bahwa hilirisasi berpotensi meningkatkan pendapatan petani sebesar 15–60% dan menaikkan PDRB sektor kelapa hingga 35–40%. Tanpa intervensi kebijakan berupa hilirisasi berbasis desa dan penetapan harga minimum, risiko alih fungsi lahan kelapa ke kelapa sawit akan meningkat, yang berpotensi merusak ekosistem pesisir serta menghilangkan identitas daerah sebagai pusat kelapa dunia.

Article history:

Received 12 05, 2025

Revised 12 23, 2025

Accepted 12 29, 2025

Keywords:

Coconut Downstreaming, Indragiri Hilir, Value-Added, Monopsony, Resource Drain, Farmer Income.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, secara global dikenal dengan julukan "*Negeri Hamparan Kelapa Dunia*". Predikat ini bukan tanpa alasan, mengingat wilayah ini memiliki luas perkebunan kelapa mencapai kurang lebih 303.927 hektar pada tahun 2023. Uniknya, struktur kepemilikan lahan di Inhil didominasi oleh perkebunan rakyat yang mencapai 80%, menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi bagi sekitar 70% masyarakat setempat. Sektor kelapa memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Inhil, yakni pada kisaran 15–20% dari total sektor pertanian.

Namun, besarnya potensi hulu ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani di sektor hilir. Saat ini, pola perdagangan kelapa di Inhil masih didominasi oleh penjualan kelapa bulat atau bahan mentah. Harga jual kelapa di tingkat petani sangat rendah, berkisar antara Rp 1.000 hingga Rp 2.500 per butir. Kondisi ini diperparah oleh rantai distribusi yang panjang dan ketergantungan yang tinggi terhadap tengkulak serta fluktuasi harga pasar global. Tanpa adanya transformasi industri, nilai tambah komoditas kelapa justru lebih banyak dinikmati oleh pihak luar daerah maupun luar negeri yang memiliki infrastruktur pengolahan lebih maju.

Pemerintah sebenarnya telah merancang strategi hilirisasi untuk mengubah wajah ekonomi Inhil. Hilirisasi bertujuan untuk mengolah kelapa menjadi produk turunan bernilai tinggi seperti *Virgin Coconut Oil* (VCO), santan instan, oleokimia, hingga pemanfaatan limbah menjadi arang briket dan *coco fiber*. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan *multiplier effect*, mulai dari penyerapan tenaga kerja baru, penguatan UMKM, hingga peningkatan daya saing ekspor daerah.

Namun, rencana strategis hilirisasi ini menghadapi ancaman pembatalan atau hambatan implementasi yang serius. Pembatalan rencana hilirisasi di tengah mendesaknya kebutuhan peremajaan (*replanting*) kebun tua dan ancaman abrasi lahan dapat memicu dampak sosio-ekonomi yang sistemik. Kegagalan hilirisasi tidak hanya menyebabkan pendapatan riil petani stagnan, tetapi juga berisiko mendorong alih fungsi lahan besar-besaran ke komoditas lain seperti kelapa sawit, yang pada akhirnya dapat menghilangkan identitas Inhil sebagai pusat kelapa dunia.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembatalan rencana hilirisasi perkebunan kelapa terhadap struktur pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penguatan sektor perkebunan rakyat yang berkelanjutan dan berbasis nilai tambah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak pembatalan rencana hilirisasi terhadap struktur pendapatan petani dan potensi kerugian nilai tambah ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Sejauh mana ketergantungan pada model pasar tunggal (monopsoni) dan fenomena *resource drain* ke luar negeri menghambat transformasi industri kelapa di Inhil?
3. Apa risiko jangka panjang terhadap keberlanjutan ekosistem perkebunan kelapa dan ancaman alih fungsi lahan akibat rendahnya insentif hilirisasi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan Menganalisis dampak pembatalan hilirisasi terhadap pendapatan petani dan kerugian nilai tambah ekonomi lokal, Mengevaluasi peran struktur pasar monopsoni dan ekspor bahan mentah dalam menghambat transformasi industri kelapa dan Mengidentifikasi risiko jangka panjang terhadap eksistensi perkebunan kelapa dan ancaman alih fungsi lahan di Inhil.

2. TELAAH PUSTAKA

2.1 Teori Nilai Tambah (*Value-Added Theory*) dalam Hilirisasi

Hilirisasi merupakan strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah komoditas melalui proses pengolahan lanjutan. Nilai tambah tercipta ketika produk primer mengalami transformasi menjadi produk sekunder atau tersier yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi [4]. Dalam konteks pembangunan berbasis sumber daya alam, hilirisasi berperan penting dalam meningkatkan pendapatan produsen di wilayah hulu serta memperkuat struktur ekonomi lokal.

Pengembangan hilirisasi memungkinkan wilayah produsen berpartisipasi lebih aktif dalam rantai nilai global (*global value chain*). Kaplinsky [5] menegaskan bahwa penguasaan aktivitas bernilai tambah merupakan prasyarat utama bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tanpa penguatan sektor hilir, daerah penghasil komoditas berisiko terjebak sebagai pemasok bahan mentah dengan margin keuntungan yang rendah.

Pada sektor pertanian dan perkebunan, termasuk industri kelapa, hilirisasi terbukti mampu meningkatkan nilai ekonomi komoditas dan menciptakan lapangan kerja baru. Laporan OECD [8] dan UNIDO [12] menunjukkan bahwa pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan daya saing.

2.2 Struktur Pasar Monopsoni dan Ketimpangan Harga Petani

Struktur pasar pertanian di banyak negara berkembang cenderung bersifat monopsonistik, yaitu kondisi di mana terdapat banyak penjual (petani) tetapi hanya sedikit pembeli yang memiliki kekuatan pasar dominan. Dalam struktur pasar seperti ini, pembeli berperan sebagai *price setter*, sementara petani menjadi *price taker* [10]. Kondisi tersebut menyebabkan harga komoditas pertanian sering kali berada di bawah tingkat yang efisien secara ekonomi.

Sexton dan Xia [10] menjelaskan bahwa meningkatnya konsentrasi pelaku di sisi hilir memperkuat ketimpangan daya tawar dan menekan pendapatan petani. Studi Bellemare dan Bloem [3] juga menunjukkan bahwa ketergantungan petani pada pembeli terbatas berdampak negatif terhadap kesejahteraan rumah tangga petani.

Dalam konteks Indonesia, struktur pasar yang tidak kompetitif pada sektor pertanian masih menjadi permasalahan utama. Rachman [9] serta Kurniawan dan Saptana [6] menegaskan bahwa ketiadaan alternatif industri pengolahan lokal memperkuat ketergantungan petani pada pedagang perantara, sehingga distribusi nilai tambah menjadi tidak merata.

2.3 *Resource Drain, Economic Leakage*, dan *Low-Income Trap*

Fenomena *resource drain* terjadi ketika wilayah kaya sumber daya alam mengekspor komoditas dalam bentuk mentah ke wilayah lain yang memiliki kapasitas pengolahan lebih maju. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kebocoran ekonomi (*economic leakage*), di mana nilai tambah dan keuntungan utama justru dinikmati oleh wilayah atau negara pengimpor [11].

Auty [1] menjelaskan bahwa ketergantungan pada ekspor bahan mentah tanpa pengembangan industri hilir dapat menimbulkan *low-income trap*, meskipun suatu wilayah memiliki sumber daya alam yang melimpah. Laporan UNCTAD [11] menegaskan bahwa kegagalan dalam membangun industri pengolahan domestik memperlebar kesenjangan ekonomi dan menghambat transformasi struktural ekonomi daerah.

Dalam konteks komoditas perkebunan, termasuk kelapa, pembatalan program hilirisasi berpotensi memperkuat fenomena *capital flight*, karena nilai ekonomi produk olahan berpindah ke luar daerah produsen [12].

2.4 Teori Alih Fungsi Lahan dan Keberlanjutan Ekologi

Keputusan petani dalam mempertahankan atau mengonversi lahan sangat dipengaruhi oleh insentif ekonomi relatif antar komoditas. Berdasarkan pendekatan ekonomi penggunaan lahan, petani cenderung memilih komoditas yang memberikan keuntungan ekonomi tertinggi [7]. Apabila nilai ekonomi suatu komoditas menurun akibat lemahnya pengembangan industri hilir, maka alih fungsi lahan menjadi pilihan rasional.

Namun, konversi lahan di wilayah pesisir membawa konsekuensi ekologis yang signifikan. Barbier [2] menekankan bahwa degradasi ekosistem pesisir dapat menghilangkan fungsi perlindungan alami dan menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang. Wahyuno dan Siregar [13] menambahkan bahwa tanaman kelapa memiliki peran ekologis penting sebagai penahan abrasi dan penstabil ekosistem lahan pasang surut.

Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme insentif ekonomi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus di Kabupaten Indragiri Hilir. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari BPS Indragiri Hilir (2023), laporan industri kelapa, serta literatur terkait dampak hilirisasi.

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama:

1. Analisis Nilai Tambah: Membandingkan nilai ekonomi kelapa mentah dengan produk turunan (VCO dan *Desiccated Coconut*).
2. Analisis Deskriptif Struktural: Mengkaji pengaruh struktur pasar monopsoni terhadap daya tawar petani.
3. Simulasi Dampak Ekonomi: Mengestimasi potensi kerugian PDRB dan pendapatan riil masyarakat pasca pembatalan hilirisasi.

Validasi hasil dilakukan melalui teknik triangulasi data dengan membandingkan angka statistik pemerintah dan realitas harga pasar di tingkat petani.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dampak Strategis Hilirisasi di Inhil

Hilirisasi kelapa di Indragiri Hilir membawa dampak strategis yang terbagi menjadi manfaat positif dan risiko yang harus dimitigasi. Dari sisi manfaat, hilirisasi menjamin peningkatan nilai jual petani sehingga mereka tidak lagi bergantung pada penjualan kelapa bulat yang harganya sangat fluktuatif; keberadaan industri pengolahan lokal membuat harga bahan baku cenderung lebih stabil dan tinggi karena adanya permintaan terus-menerus. Selain itu, proyek ini mampu menciptakan lapangan kerja baru melalui penyerapan tenaga kerja lokal di pabrik skala besar maupun UMKM, mulai dari pemanen hingga staf administrasi.

Efisiensi logistik juga tercipta karena penempatan pabrik di dekat sentra produksi dapat menekan biaya transportasi, sehingga produk kelapa Indonesia lebih kompetitif secara global. Hal ini berdampak pada penguatan ekonomi lokal melalui pertumbuhan UMKM produk turunan seperti VCO dan kerajinan batok, serta mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur seperti jalan kebun, pelabuhan, dan energi di wilayah pesisir.

Namun, terdapat tantangan besar berupa stabilitas pasokan karena banyak kebun rakyat yang sudah tua dan rusak akibat abrasi. Selain itu, kapasitas penyerapan industri besar seperti Sambu Group yang fluktuatif dapat membatasi kuota saat panen raya, yang langsung berdampak pada anjloknya harga. Tantangan

lainnya meliputi sulitnya akses teknologi dan modal bagi UMKM serta perlunya pengelolaan limbah industri yang ketat agar tidak menimbulkan isu lingkungan.

4.2 Perbandingan Kapasitas Industri Pengolahan Kelapa

Industri pengolahan di Inhil saat ini didominasi oleh perusahaan besar, terutama Sambu Group (PT Pulau Sambu dan PT RSUP) yang merupakan salah satu pengolah kelapa terbesar di dunia dengan merek terkenal seperti Kara. Sambu Group memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada petani, di mana 90% pasokan bahan baku atau sekitar 5 juta butir kelapa per hari berasal dari perkebunan rakyat. Perusahaan ini memiliki kapasitas pengolahan yang sangat besar, mampu memproduksi minyak kelapa mentah (CNO), minyak goreng, santan kemasan, hingga pelet bungkil kelapa, didukung oleh fasilitas dermaga dan pembangkit listrik mandiri.

Model bisnisnya adalah *sustainable social enterprise* dengan pola interdependensi, meskipun dalam praktiknya sering menjadi penentu harga pasar lokal. Sementara itu, informasi mengenai AE Brothers cenderung tidak sejelas Sambu Group dalam sumber publik. Secara keseluruhan, keberlanjutan industri besar di Inhil sangat bergantung pada stabilitas pasokan petani rakyat, mengingat kapasitas pabrik jauh melebihi luas kebun perusahaan sendiri, seperti PT RSUP yang hanya memiliki lahan sekitar 7.679 Ha dibandingkan total luas kebun Inhil yang mencapai 303.927 Ha.

4.3 Dampak Ganda terhadap Pendapatan Masyarakat Inhil

Pembatalan hilirisasi menyebabkan pendapatan petani terjepit oleh praktik monopoli dan fluktuasi harga. Sambu Group, sebagai pembeli dominan sejak 1970-an, memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat dibandingkan petani, sehingga harga pembelian sering ditentukan sepihak tanpa transparansi. Data empiris BPS Inhil 2023 menunjukkan harga kelapa bulat di tingkat petani hanya Rp 1.200–2.200 per butir, sedangkan harga ekspor *desiccated coconut* (DC) mencapai Rp 7.000–9.000 per butir setara.

Hal ini berarti nilai tambah sebesar 300–600% dinikmati oleh perusahaan, bukan petani. Selain itu, terjadi fenomena *resource drain* di mana Inhil menjadi penyuplai bahan mentah (kopra dan kelapa bulat) terbesar ke Vietnam, Thailand, dan India untuk diolah menjadi produk premium. Ironisnya, Indonesia justru mengimpor kembali produk olahan tersebut dengan harga 5–10 kali lipat lebih tinggi. Akibatnya, petani tidak terlibat dalam rantai nilai tinggi (*high-value chain*), daerah kehilangan potensi devisa, dan tidak terjadi alih teknologi bagi masyarakat lokal.

4.4 Pembatalan Hilirisasi: Risiko Konversi Lahan dan Kerugian Ekonomi

Pembatalan rencana pembangunan *Integrated Coconut Industrial Estate* membunuh harapan diversifikasi dan kemandirian ekonomi. Tanpa adanya insentif investasi, pelatihan SDM, dan dukungan infrastruktur seperti *cold storage* atau listrik yang stabil, masyarakat tetap terjebak di sektor hulu dengan produktivitas rendah. Simulasi kasar menunjukkan bahwa tanpa hilirisasi, harga rerata kelapa tetap di angka Rp 1.800, padahal dengan hilirisasi harga diproyeksikan mencapai Rp 2.500–3.000 per butir (kenaikan 15–60%).

Hilirisasi juga berpotensi menambah 150–300 tenaga kerja baru per unit pengolahan dan meningkatkan PDRB sektor kelapa sebesar 35–40% dalam 5 tahun dari angka stagnan Rp 1,2 triliun. Secara ekologis, kegagalan ini mendorong petani menebang pohon kelapa tua tanpa regenerasi atau mengalihfungsikan lahan ke sawit, yang berujung pada kerusakan ekosistem pesisir karena hilangnya peran kelapa sebagai penahan abrasi.

5. Faktor Pemicu Kegagalan dan Solusi Strategis ke Depan

Kegagalan ini dipicu oleh regulasi tumpang tindih antar kementerian, lobi korporasi besar yang kuat untuk mempertahankan model *single-buyer*, serta ketergantungan struktural di mana negara tetangga sengaja

menjaga pasokan bahan baku murah dari Inhil. Sebagai solusi, dalam jangka pendek Pemda perlu membentuk Koperasi Inti Kelapa Inhil (KIKI), membangun sentra pengolahan desa, dan menerapkan Harga Patokan Minimum (HPM).

Jangka menengah mencakup negosiasi ulang skema bagi hasil dengan Sambu Group (misal 60:40), menggagas "Inhil Coconut Brand", dan membangun pelabuhan ekspor khusus di Kuala Indragiri. Jangka panjangnya, paradigma harus diubah dengan menjadikan kelapa sebagai bahan industri hijau (biofuel/bioplastik) serta melibatkan kolaborasi teknologi dengan pihak seperti PT RAPP atau Pertamina

5. KESIMPULAN

Hilirisasi kelapa di Indragiri Hilir memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah produk (VCO, karbon aktif, oleokimia). Namun, potensi ini terancam oleh masalah di sektor hulu, yaitu rendahnya produktivitas dan kerusakan kebun kelapa rakyat serta fluktuasi harga yang dikendalikan oleh daya serap industri besar.

Rekomendasi Utama:

1. Replanting & Infrastruktur: Pemerintah Daerah harus mempercepat program peremajaan kelapa dan perbaikan infrastruktur water management untuk mengatasi abrasi, menjamin ketersediaan dan kualitas bahan baku bagi industri.
2. Penguatan UMKM: Mendorong hilirisasi di tingkat masyarakat (UMKM) untuk produk khusus seperti VCO dan arang briket ekspor, memberikan alternatif pasar bagi petani selain industri besar.
3. Transparansi Harga: Menciptakan mekanisme tata niaga yang lebih transparan dan adil, sehingga petani mendapat kepastian harga yang stabil, tidak hanya saat industri besar membutuhkan bahan baku.
4. Pembatalan hilirisasi kelapa di Inhil bukan hanya soal kebijakan yang gagal—tapi pengulangan pola kolonial lama: ekspor bahan mentah, impor barang jadi. Di tengah monopoli Sambu Group dan eksploitasi bahan baku oleh Vietnam–Thailand–India, masyarakat Inhil terus menjadi penonton di tanah kelapanya sendiri. Padahal, potensi nilai tambah dari 450 juta butir kelapa/tahun di Inhil bisa mencapai lebih dari Rp 2 triliun, cukup untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun kemandirian ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. M. Auty, "Natural resources and economic development: The curse and the blessing," *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 33, no. 2, pp. 170–185, 2017, doi: 10.1093/oxrep/grx004.
- [2] E. B. Barbier, "The protective value of estuarine and coastal ecosystem services in a wealth accounting framework," *Ecosystem Services*, vol. 24, pp. 35–46, 2017, doi: 10.1016/j.ecoser.2017.02.004.
- [3] M. F. Bellemare and J. R. Bloem, "Does contract farming improve welfare? A review," *World Development*, vol. 112, pp. 259–271, 2018, doi: 10.1016/j.worlddev.2018.08.018.
- [4] A. Daryanto and Y. Hafizrianda, *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Bogor, Indonesia: IPB Press, 2018.
- [5] R. Kaplinsky, "Global value chains and inclusive development," *Journal of International Development*, vol. 28, no. 7, pp. 1018–1031, 2016, doi: 10.1002/jid.3133.
- [6] A. Kurniawan and S. Saptana, "Struktur pasar dan efisiensi pemasaran komoditas pertanian di Indonesia," *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 39, no. 2, pp. 87–101, 2021, doi: 10.21082/fae.v39n2.2021.87-101.
- [7] E. F. Lambin *et al.*, "The role of supply-chain initiatives in reducing deforestation," *Nature Climate Change*, vol. 10, no. 2, pp. 109–116, 2020, doi: 10.1038/s41558-019-0686-8.
- [8] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Global Value Chain Development Report 2019: Technological Innovation, Supply Chain Trade, and Workers in a Globalized World*. Paris, France: OECD Publishing, 2019, doi: 10.1787/0c8a02a7-en.

-
- [9] H. P. S. Rachman, "Dinamika struktur pasar dan kesejahteraan petani komoditas pertanian strategis," *Analisis Kebijakan Pertanian*, vol. 17, no. 1, pp. 45–60, 2019, doi: 10.21082/akp.v17n1.2019.45-60.
- [10] R. J. Sexton and T. Xia, "Increasing concentration in the agricultural supply chain: Implications for market power and sector performance," *Annual Review of Resource Economics*, vol. 10, pp. 229–251, 2018, doi: 10.1146/annurev-resource-100517-023312.
- [11] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Commodities and Development Report 2019*. Geneva, Switzerland: UNCTAD, 2019.
- [12] United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), *Industrial Development Report 2020: Industrializing in the Digital Age*. Vienna, Austria: UNIDO, 2020.
- [13] D. Wahyuno and M. Siregar, "Peran tanaman kelapa dalam mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir," *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*, vol. 24, no. 3, pp. 137–146, 2018.